

PRESIDEN BARU MALTA MULAI MENJABAT

Presiden baru Malta Myriam Spiteri Debono melambai ke arah kerumunan di balkon Istana Grandmaster di Valletta, Malta, Kamis (4/4). Presiden baru Malta Myriam Spiteri Debono dilantik sebagai Presiden Malta ke-11, menyusul resolusi parlemen dengan suara bulat.



Populasi Eropa Diprediksi akan Berubah dalam Beberapa Dekade ke Depan

Eropa tengah mengalami penurunan angka kelahiran yang cukup drastis.

JAKARTA (IM) - Pandemi The Black Death yang melanda Eropa dan Asia selama lima tahun pada pertengahan 1300-an diyakini mengurangi populasi dunia sampai sepertiganya.

Hampir 700 tahun kemudian penelitian terbaru memperingatkan turunnya angka kelahiran yang dianggap akan menyusutkan jumlah manusia di bumi yang kini sebanyak 8 miliar jiwa dalam beberapa dekade ke depan akan mengakibatkan "perubahan sosial yang mengejutkan."

Berdasarkan penelitian terbaru yang dirilis jurnal medis internasional The Lancet angka kelahiran di seluruh dunia mengalami penurunan.

Penelitian itu mengatakan angka kelahiran pada tahun

2021 di lebih dari setengah negara dan wilayah di seluruh dunia berada di tingkat di bawah replacement level atau tingkat penggantian populasi. Replacement level merupakan indikator angka kelahiran yang dibutuhkan agar angka populasi suatu negara atau wilayah tetap.

Salah satu penulis laporan penelitian tersebut Natalia V Bhattacharjee mengatakan dampak penurunan populasi ini "sangat besar" terutama di negara Eropa Barat yang sedang mengalami keresahan akibat imigrasi.

"Tren angka kelahiran dan kesuburan di masa depan akan mengubah perekonomian global dan keseimbangan kekuatan internasional sepenuhnya serta membutuhkan reorganisasi

masyarakat," kata Bhattacharjee seperti dikutip dari *Aljazeera*, Kamis (4/4).

Penelitian ini mengungkapkan turunnya angka kelahiran di negara-negara Eropa Barat dalam beberapa dekade ke depan akan memaksa negara-negara itu membuka diri pada imigrasi untuk mengatasi masalah ini.

Sementara kelompok-kelompok sayap kanan membuat masalah angka kesuburan sebagai isu kontroversial.

Penelitian yang berjudul "Global fertility in 204 countries and territories, 1950-2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021" disusun tim peneliti internasional dari Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan (IHME) Universitas Washington.

Penelitian ini berdasarkan premis yang diterima umum bahwa total angka kelahiran atau kesuburan (TRF) satu negara harus 2,1 anak per perempuan untuk memastikan angka populasinya stabil.

Namun penelitian ini menemukan TRF di Eropa Barat pada tahun 2021 hanya 1,53 dan diprediksi menjadi 1,44 pada tahun 2050 kemudian turun lagi menjadi 1,37 pada tahun 2100. Diperkirakan Spanyol yang akan paling parah yakni 1,11 anak per perempuan pada tahun 2100.

Para peneliti memprediksi TRF Samoa, Somalia, Niger, Chad dan Tajikistan tetap di atas 2,1 untuk satu abad ke depan.

Pakar mengatakan turunnya angka kelahiran disebabkan oleh partisipasi perempuan di tempat kerja dan meningkatnya akses pada kontrasepsi. Menurut beberapa lembaga termasuk PBB semakin banyak perempuan yang bekerja semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi.

"Saat kekayaan negara bertambah, angka kelahiran menurun, seperti datangnya malam setelah siang," kata pakar ekonomi mikro Philip Pilkington di surat kabar Inggris Daily Telegraph pada Januari lalu.

Turunnya angka kelahiran juga berkaitan dengan kemajuan ilmu medis yang artinya keluarga tidak perlu menghasilkan sebanyak mungkin anak untuk memastikan kelangsungan keturunannya. Seperti yang dipercayai banyak masyarakat di abad-abad sebelumnya.

Bila penelitian yang dipublikasikan di The Lancet benar maka Inggris yang angka kesuburannya diprediksi turun dari 1,49 pada tahun 2021 menjadi 1,38 pada tahun 2050 dan 1,3 pada tahun 2100, harus mengandalkan imigrasi untuk delapan dekade ke depan atau lebih untuk mempertahankan populasinya yang saat ini dibawah 68 juta orang.

Lebih sedikit bayi yang lahir dan kemajuan kedokteran yang memperpanjang umur harapan hidup artinya negara-negara Eropa Barat terancam menghadapi penuaan populasi. Lebih sedikit anak muda yang mengumpulkan kekayaan untuk mencukupi biaya perawatan orang lanjut usia akan menjadi tantangan ekonomi besar untuk beberapa dekade ke depan.

Penelitian yang dipublikasikan di The Lancet juga memprediksi satu dari dua anak yang lahir pada tahun 2100 akan lahir di sub-Sahara Afrika.

Sementara negara-negara pendapatan tinggi akan kesulitan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Pakar mengatakan satu-satunya solusi adalah mengizinkan lebih banyak imigrasi dari negara-negara berpenduduk muda. Lalu apakah Barat harus mengadopsi kebijakan perbatasan terbuka? Para pakar menjawab: "Ya."

"Ketika populasi semua negara menyusut, mengizinkan imigrasi terbuka akan menjadi kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi," kata Bhattacharjee.

"Negara-negara sub-sahara Afrika memiliki sumber daya penting yang hilang dari masyarakat lanjut usia: populasi anak muda," tambahnya. Namun, gagasan menge-

nai kebijakan "imigrasi terbuka" merupakan kutukan bagi banyak negara demokrasi Barat saat ini. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menjadikan pembatasan imigrasi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Ia ingin mengirim pencari suaka ke Rwanda.

Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin menerapkan undang-undang imigrasi "garis keras" yang diloloskan parlemen bulan Desember tahun lalu.

Namun pada akhir Januari lalu Mahkamah Konstitusi Prancis yang memeriksa undang-undang baru untuk memastikan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Prancis, membatalkan sebagian besar RUU tersebut. Termasuk proposal untuk membatasi akses migran ke tunjangan kesejahteraan, sehingga mendorong Macron untuk mengumumkan versi yang lebih longgar dari rancangan undang-undang tersebut.

Namun banyak pengamat yang menilai undang-undang imigrasi yang baru tetap mencerminkan semakin kerasnya peraturan imigrasi Prancis.

Jauh sebelum penelitian di The Lancet dipublikasikan kelompok sayap kanan sudah khawatir dengan gagasan turunnya angka kelahiran. Terutama setelah teori konspirasi "the Great Replacement" atau Penggantian Besar dipopulerkan filsuf Prancis, Renaud Camus dalam bukunya yang terbit tahun 2011.

Teori itu mempromosikan gagasan salah dan rasialis mengenai turunnya angka kelahiran di masyarakat Barat. Camus mengatakan turunnya angka kelahiran ini bagian dari "rencana" untuk "mengganti" masyarakat kulit putih dengan kelompok ras lain.

Perdana menteri Hungaria Viktor Orban juga dituntut memanfaatkan teori "Penggantian Besar" dalam upayanya mengadvokasi peningkatan angka kelahiran di Eropa, termasuk di negaranya sendiri. ● tom

Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

MYANMAR (IM) - Sekjen PBB Antonio Guterres berencana menunjuk utusan khusus untuk krisis Myanmar yang sedang berlangsung, kata seorang pejabat pada Kamis (4/4).

"Sekretaris Jenderal bermaksud untuk menunjuk utusan khusus dalam beberapa hari mendatang untuk terlibat dengan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), negara-negara anggota dan semua pemangku kepentingan untuk maju menuju solusi politik yang dipimpin Myanmar terhadap krisis ini," Asisten Sekretaris Jenderal untuk Timur Tengah dan Asia Pasifik, Khaled Khiari, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar.

Khiari mengatakan Guterres mendesak adanya "tanggapan terpadu" ketika kekerasan terus meningkat di seluruh Myanmar, memicu pengungsian dan memperdalam krisis politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia.

"Meluasnya konflik bersenjata di seluruh negeri telah menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap layanan penting, serta berdampak buruk terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar," katanya.

Menekankan bahwa di Negara Bagian Rakhine, pertempuran antara militer dan Tentara Arakan telah mencapai "tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ia mengatakan bahwa Tentara Arakan dilaporkan telah memperoleh kendali teritorial atas sebagian besar wilayah tengah Rakhine dan berupaya memperluas wilayahnya ke Rakhine utara di mana masih banyak warga Rohingya yang tinggal.

"Mengatasi akar penyebab krisis Rohingya sangat penting untuk membangun

jalan keluar yang berkelanjutan dari krisis saat ini.

"Kegagalan untuk melakukan hal ini dan berlakunya impunitas hanya akan terus memicu lingkaran setan kekerasan di Myanmar. Penting bagi semua pihak di Rakhine untuk melindungi populasi Rohingya," kata Khiari.

Ia menyoroti meningkatnya kekhawatiran mengenai pengungsi perempuan dan anak perempuan Rohingya, yang menghadapi peningkatan risiko kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia.

Ketika krisis berkepanjangan semakin dalam, Khiari mengatakan Guterres mendorong negara-negara anggota untuk memanfaatkan pengaruhnya guna membuka saluran kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, mengakhiri kekerasan dan mencari solusi politik komprehensif yang mengarah pada masa depan Myanmar yang inklusif dan damai.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen untuk tetap tinggal dan menyampaikan solidaritas dengan rakyat Myanmar," tambahnya.

Pada 2017, militer Myanmar melancarkan operasi kekerasan terhadap populasi Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara yang oleh kelompok hak asasi manusia disebut sebagai genosida. Hampir 1,2 juta orang Rohingya terpaksa pindah ke negara tetangga Bangladesh, tempat mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.

Sejak kudeta di Myanmar pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melakukan "penindasan brutal secara nasional" terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahannya. ● tom



REMAJA PUTRI VANCOUVER MEMPELAJARI KETERAMPILAN PERDAGANGAN

Seorang siswi memoles permukaan mobil di bengkel saat acara Jill of All Trades di Institut Teknologi British Columbia di Vancouver, British Columbia, Kanada, Kamis (4/4). Siswa sekolah menengah perempuan mengikuti berbagai lokakarya untuk mempelajari berbagai keterampilan perdagangan langsung di 'Jill of All Trades', sebuah acara yang bertujuan untuk mendorong perempuan muda untuk mengejar karir di bidang perdagangan terampil.

Blinken: Pada Akhirnya Ukraina akan Jadi Anggota NATO

NEW YORK (IM) - Setelah berperang dengan Rusia selama bertahun-tahun, Ukraina pada akhirnya akan menjadi bagian dari NATO.

Prediksi itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken setelah menggelar pertemuan dengan para Menlu NATO dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba di Brussels pada Kamis (4/4).

Menurut Blinken, pertemuan itu dilakukan untuk membantu Ukraina menuju akses dalam NATO. Dukungan dari para mitra dinilai mampu membuat Kyiv secepatnya bergabung.

"Tentu saja, kami percaya bahwa Ukraina layak menjadi anggota NATO dan hal ini harus terjadi secepatnya," tegasnya, seperti dimuat Associated Press.

Potensi keanggotaan Ukraina dalam aliansi yang beranggotakan 32 negara tersebut dipandang sebagai salah satu alasan Rusia menginvasi negara tersebut.

Senator J.D. Vance, R-

Ohio menilai pernyataan Biden tentang peluang Ukraina masuk NATO sangat tidak bertanggung jawab.

Pasalnya dengan mengikutsertakan Ukraina dalam keanggotaan, berarti seluruh anggota NATO wajib berperang melawan Rusia.

"Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO, dan mengundang mereka saat perang berarti mengundang negara kita berperang," tulisnya di platform X.

Aliansi tersebut sedang memperdebatkan rencana untuk memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina seiring dengan semakin besarnya kendali Rusia di medan perang.

"Kami sangat yakin bahwa dukungan kepada Ukraina harus tidak terlalu bergantung pada penawaran sukarela jangka pendek dan lebih bergantung pada komitmen yang berjangka panjang NATO," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sebelum pertemuan para Menlu NATO. ● tom

Kelaparan di Gaza: Oxfam Sebut Warga di Utara Hanya Konsumsi 245 Kalori per Hari

GAZA (IM) - Organisasi Oxfam International melaporkan bahwa situasi kelaparan di utara Jalur Gaza membuat warga hanya mengonsumsi rata-rata 245 kalori per hari.

Angka ini hanya 12 persen dari asupan 2.100 kalori per hari yang disarankan untuk manusia.

Organisasi yang berfokus pada kemiskinan itu menyebut, perhitungan ini berdasarkan data demografis yang tersedia.

Oxfam menyebut bahwa jumlah bantuan pangan yang masuk ke Gaza sejak awal perang baru memenuhi 41 persen kebutuhan kalori per orang.

"Pemerintah Israel selama hampir dua dekade tahu berapa kalori per hari yang dibutuhkan untuk mencegah malnutrisi di Gaza, menghitung ini berdasarkan usia dan gender sesuai dokumen Food Consumption in the Gaza Strip - Red Line," demikian keterangan Oxfam dikutip Al Jazeera, Kamis (4/4/2024).

"Itu tidak hanya menggunakan kalkulasi lebih tinggi 2.279 kalori per orang, tetapi juga menghitung produksi pangan domestik di Gaza yang kini telah dinyatakan Israel," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Oxfam International, Amitabh Behar menyebut Israel sengaja menumbulkan kelaparan di Jalur Gaza. Sebelumnya, berbagai organisasi internasional menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.

"Israel sengaja memilih untuk membuat warga sipil kelaparan," kata Behar. "Bayangkan, tidak hanya mencoba hidup dengan 245 kalori per hari, tetapi juga harus melihat anak-anak Anda atau kerabat yang sudah lansia melakukan hal yang sama."

Semua ini terjadi saat mengungsi, di tengah ancaman konstan drone dan bom. Sekitar 2,3 juta penduduk Jalur Gaza terancam kelaparan akibat pengepungan total Israel.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza pun semakin terhambat usai Israel menyerang staf organisasi World Central Kitchen (WCK) pada 1 April lalu.

Menurut data terkini Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu telah membunuh 33.037 orang Palestina.

Lebih dari setengah korban Israel adalah perempuan dan anak-anak. ● tom

Biden Desak Netanyahu Segera Lakukan Gencatan Senjata di Gaza

NEW YORK (IM) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyampaikan kelanjutan dukungan AS akan bergantung pada tindakan Israel untuk melindungi warga sipil Gaza. Biden mendesak "gencatan senjata segera."

Dilansir AFP percakapan keduanya itu dilakukan usai pembunahan tujuh pekerja bantuan oleh Israel yang menurut Israel adalah sebuah kesalahan. Dalam pernyataan yang disampaikan Gedung Putih, Biden mendesak Netanyahu untuk "mengumumkan dan menerapkan serangkaian langkah spesifik, konkret, dan terukur untuk mengatasi kerugian sipil, penderitaan kemanusiaan, dan keselamatan warga sipil, pekerja bantuan."

Biden "menjelaskan bahwa kebijakan AS sehubungan dengan Gaza akan ditentukan oleh penilaian kami terhadap tindakan segera Israel terhadap langkah-langkah ini," katanya.

Pemimpin AS tersebut

mengatakan kepada Netanyahu bahwa serangan terhadap pekerja kemanusiaan serta situasi kemanusiaan di Gaza, di mana PBB telah memperingatkan akan terjadinya kelaparan, "tidak dapat diterima."

Biden "menggarisbawahi bahwa gencatan senjata segera sangat penting untuk menstabilkan dan memperbaiki situasi kemanusiaan dan melindungi warga sipil yang tidak bersalah. Dia mendesak Netanyahu untuk memberdayakan para perundingnya untuk mencapai kesepakatan tanpa penundaan untuk memulangkan para sandera," kata pernyataan tersebut.

Biden selama berbulan-bulan telah menyuarakan rasa frustrasinya terhadap Netanyahu, namun juga dengan gigih membela hak Israel untuk menanggapi Hamas.

Meskipun ada tekanan dari Partai Demokrat yang mengusung Biden, pemerintah AS terus mengalirkan pasokan militer senilai jutaan dolar ke Israel meski mengkritik perilaku perang tersebut. ● tom